Wacana– Vol. 19, No. 3 (2016)

ISSN : 1411-0199
E-ISSN : 2338-1884

Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Komunitas Nelayan Tradisional dalam Rangka Strategi Bertahan Hidup (Studi Kasus: Di Dusun Karanggongso Kabupaten Trenggalek)

Siti Rofingatin[1], Darsono Wisadirana[2], Sanggar Kanto[3]

[1]Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
[2]Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
[3] Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Abstrak

Salah satu strategi bertahan hidup nelayan untuk meningkatkan kemandirian mereka adalah dengan memanfaatkan lembaga ekonomi dari komunitas sendiri ketika menghadapi musim paceklik dan cuaca buruk yang setiap tahun menyertai kehidupannya. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendeskripsikan model kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional, 2) merumuskan model pengembangan yang tepat pada kelembagaan ekonomi komunitas nelayan Karanggongso Trenggalek. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode studi kasus, dan untuk analisis kelembagaan menggunakan imperatif fungsional AGIL dari Talcott Parsons. Hasil penelitian antara lain: terbatasnya permodalan, belum ada solusi masalah kebersihan dan keamanan lingkungan, terbatasnya Tenaga Pendamping dan kurang maksimalnya peran dan fungsi Tenaga Penyuluh Perikanan, serta belum terpenuhi ciri kelembagaan yaitu ketiadaan sekretariat. Alternatif solusi permasalahan yaitu pengembangan jaringan bersama dengan lembaga yang telah eksis dan akomodatif, pemberian alternatif solusi bagi masalah kebersihan dan keamanan lingkungan, penambahan Tenaga Pendamping dan peningkatan peran dan fungsi Penyuluh Perikanan, serta mewujudkan salah satu ciri kelembagaan yaitu pembentukan sekretariat.
Kata kunci: lembaga ekonomi, nelayan, AGIL

Abstract

One of the survival strategies of fishermen to increase their independence with harness the economic institutions of its own community when faced famine season and bad weather that accompany their life every year. This research aims to: 1) describe the institutional economic model of traditional fishing community, 2) formulate the right development model to institutional economic of fishing communities as a fishermen survival strategy in Karanggongso Trenggalek. Research approach is qualitative with case study method, and for analysis the institutional uses functional imperative AGIL from Talcott Parsons. The results of the research include: limited capital, there has not been solution for cleanliness problem and environmental security, limited assistant and less maximal role and function the Fisheries Extension Staff, and there has not fulfilled of institutional characteristic namely absence of a secretariat. Alternative solutions of the problems are development of networks with institution that already exist and accomodating, giving alternative solutions for cleanliness problem and environmental security, increase of assistant and enhancement of Fisheries Extension Staff, and consummate one of the institutional characteristics, namely formation of a secretariat.

Keywords: *economic institutions, fishermen, AGIL.*

PENDAHULUAN

Nelayan merupakan kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan, belum berdaya baik secara sosial, ekonomi maupun politik [1] Akar kemiskinan nelayan disebabkan ketergantungan tinggi terhadap kegiatan penangkapan ikan, sehingga tidak mau melirik peluang lain di sektor perikanan. Keragaman sumber pendapatan sangat membantu adaptasi terhadap kemiskinan, lebih tahan dan kenyal terhadap tekanan ekonomi. [2]

Hasil tangkapan ikan seringkali tidak menentu, tergantung musim dan cuaca. Menurut [3], ketika musim paceklik, sebagian nelayan kecil sering menggadaikan perkakas rumah tangga ke lembaga pegadaian. Bahkan tidak jarang menjual peralatan rumah tangga untuk menyambung hidup keluarganya. Namun disaat musim dan hasil tangkapan melimpah, nelayan lebih konsumtif dan cenderung boros. Berdasarkan observasi [4] bahwa budaya nelayan sering bertindak boros dan malas, tidak dapat memberdayakan diri dari buruknya pengelolaan keuangan secara baik dan hemat. Misalnya, ketika pendapatan saat musim ikan melimpah, mereka cenderung menghambur-hamburkan uang yang didapat.

Alamat Korespondensi Penulis:
Siti Rofingatin
Email : sitirofingatin@yahoo.co.id
Alamat : Jl. Veteran Malang 65145

Kendala musim dan cuaca tersebut sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nelayan. Kendala lain yang dihadapi nelayan adalah keterbatasan teknologi serta keterbatasan wilayah operasi yang hanya di sekitar pantai (*inshore*). Selain itu juga kendala modal yang dihadapi nelayan serta sulitnya menjangkau lembaga ekonomi formal seperti perbankan.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir menurut [5] adalah dengan memberikan kemudahan dalam mengakses sumber modal. Hal ini dilakukan dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self-finanching mechanism*) dan dilakukan dengan pembangunan solidaritas dan aksi kolektif di tengah masyarakat, berupa koperasi atau kelompok usaha bersama. [6] juga menyatakan bahwa dengan adanya kerjasama antar nelayan dalam pengadaan modal berupa lembaga ekonomi, maka akan memberikan kemudahan kepada anggota dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Beberapa penelitian membuktikan betapa pentingnya kelembagaan ekonomi yang dibangun dari komunitas nelayan, diantaranya penelitian [7] yang menyebutkan bahwa kelembagaan tersebut mampu mengakomodasi masalah dan kebutuhan masyarakat khusunya nelayan. Kusnadi (2006) menjelaskan bahwa dalam masyarakat pesisir telah terdapat pranata simpan-pinjam yang sederhana, namun fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi lokal. Oleh karena itu dirasa perlu melakukan penelitian tentang model kelembagaan ekonomi pada komunitas nelayan tradisional bernama Forum KUB Karang Madu Jaya di Karanggongso Trenggalek.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Ariyanto dan Anas (2007)[8] di Sumatera Barat mengkaji tentang model Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam program pengentasan kemiskinan. Banyak upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan kaum miskin, tetapi dirasa belum berhasil karena angka kemiskinan masih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUBE tersebut dibentuk bukan berdasar keinginan masyarakat tetapi karena ada bantuan yang akan diterima. Proses pembentukannya lebih bersifat dadakan dan bukan kristalisasi kelompok yang sudah ada di masyarakat.

Penelitian lainnya dilakukan Tjahyono *et al.* (2008)[9] di pesisir Trenggalek terhadap lembaga ekonomi-keuangan, baik bank/bukan bank, koperasi maupun perseorangan yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal pesisir.

Penelitian membahas profil masyarakat perikanan dan kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa model kelembagaan ekonomi harus memperhatikan ketepatan waktu sesuai kebutuhan peminjam. Masyarakat pesisir juga merespon positif terhadap pelatihan manajemen keuangan dan perencanaan, namun profil usaha disana relatif tidak mengalami perubahan meski ada peluang.

[10] melakukan penelitian tentang model pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir di Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian modal usaha bagi lembaga keuangan mikro dan kedai pesisir dapat meningkatkan modal sosial berupa kekuatan jaringan pemasaran, saling percaya antar kelompok nelayan dan partisipasi. Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah fokus penelitian hanya pada satu lembaga ekonomi nelayan tradisional yang masih baru dalam rangka strategi bertahan hidup.

Teori sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Teori ini membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada/bertahan dalam keseimbangan organisasi (masyarakat) dengan pola interaksi antar-subsistem yang terjadi di dalamnya. Perubahan pada satu bagian akan berpengaruh pada bagian lainnya dalam sistem secara perlahan. Jika terjadi konflik akan dicarikan solusi permasalahan supaya tetap dalam kondisi keseimbangan. Parsons mensyaratkan empat fungsi imperatif yang saling berhubungan dengan sistem tindakan (*action systems*) dan harus dimiliki sistem sosial yang merupakan karakteristik suatu sistem (Haryanto, 2012)[11].

Menurut Ritzer (2012)[12] agar suatu sistem dapat bertahan dan lestari, harus ada empat fungsi AGIL, yaitu: 1) *Adaptation* (A): suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal; 2) *Goal Attainment* (G): suatu sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya; 3) *Integration* (I): suatu sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian dari komponennya, juga mengelola hubungan diantara tiga imperatif fungsional lainnya (A, G, L); dan 4) *Latency* (L) atau fungsi pemeliharaan pola: suatu proses ketika sistem memelihara motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan *social control*, komitmen para anggota harus tetap utuh.

Analisis fungsional imperatif dengan pendekatan AGIL dari Talcott Parsons dilakukan terhadap kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional di Karanggongso (Forum KUB Karang Madu Jaya) agar dapat mempertahankan eksistensi kelembagaannya.

Konsep kelembagaan (*institutional*) selalu berkaitan dengan lembaga (*institution*), namun seringkali kesulitan dalam pemaknaannya. Kelembagaan adalah lembaga yang memiliki tujuaan tertentu. Lembaga menurut North (dalam Nurnida, 2014)[13] mempunyai 'aturan main' tentang bagaimana suatu aktivitas interaksi harus dilakukan dan bagaimana proses penegakan aturan (*enforcement)*, sehingga dibutuhkan peran organisasi bentukan kelompok individu demi tercapainya tujuan yang sama dalam kelembagaan. Menurut North (1991)[14] aturan main tersebut dikelompokkan menjadi dua: 1) aturan informal (*informal constrain*) berupa aturan tidak tertulis yang sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat dan berlaku turun temurun serta pemberian sanksi adat bagi yang melanggarnya; 2) aturan formal (*formal rules*) yaitu aturan yang dibuat pemerintah untuk menjaga tatanan dalam masyarakat dan pelanggaran aturan dikenai sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

Kelembagaan menurut Syahyuti *et al.* (2013)[15] merupakan hal yang berhubungan dengan lembaga, dimana lembaga itu sendiri menurut Syahyuti (2010)[16] merupakan hal yang berisi regulasi, norma dan elemen kultural-kognitif yang menyediakan pedoman, sumber daya, memberikan stabilitas dan makna hidup sosial. Soekanto (2012)[17] menyimpulkan bahwa kelembagaan merupakan himpunan norma dengan segala tingkatan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan bermasyarakat tanpa peduli taraf kebudayaan.

Dalam mempertahankan eksistensinya, kelembagaan membutuhkan pengembangan yang inovatif sehingga mampu bersaing di masa mendatang. Pemanfaatan kelembagaan ekonomi dari komunitas mereka sendiri, maka ketika musim paceklik ikan diharapkan bisa menjadi salah satu strategi bertahan hidup nelayan.

Strategi bertahan hidup (*survival strategy*) berawal dari teori White yang merupakan ungkapan kekuatan bertahan hidup yang dilakukan dengan cara-cara sesuai kebudayaan pada komunitas miskin atau termarginalkan (Alvita, 2013)[18]. Pada umumnya dicirikan oleh sempitnya kepemilikan aset sumber daya lahan maupun keterbatasan permodalan. Mereka memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia jika kondisi ekonomi mengalami perubahan atau memburuk (Anindyasari, 2013)[19]. Teori-teori tentang strategi bertahan hidup terus mengalami perkembangan. Strategi ini dilakukan untuk menguasai wilayah atau ruangan hidup pada komunitas miskin dan berlaku di seluruh dunia.

Kemiskinan menurut Nasikun merupakan kondisi kekurangan uang dan barang sebagai jaminan keberlangsungan hidup, dan secara luas merupakan suatu fenomena multidimensional (Suryawati, 2005)[20]. Definisi BPS tentang kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar (*basic approach*). Chamber (1987)[21] menyebut rumah tangga miskin dan lingkungannya yang terperangkap dalam mata rantai kemiskinan bagai lingkaran setan (*vicious circle*) atau perangkap kemiskinan (*deprivation trap*) yang terdiri dari *kemiskinan* itu sendiri, *kelemahan jasmani*, *isolasi*, *kerentanan* dan *ketidakberdayaan* sebagaimana dalam gambar berikut:

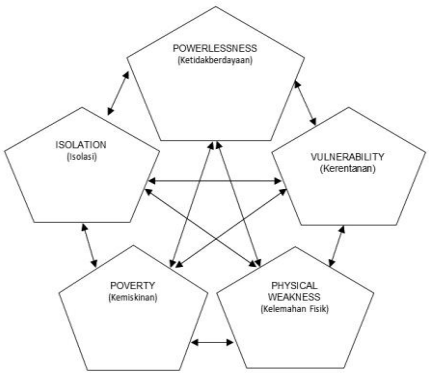

Gambar 1. Perangkap Kemiskinan Chambers (1987:45)

Dengan mengaitkan kelima faktor kemiskinan tersebut akan diperoleh 20 pola kemungkinan hubungan kausal yang akan membentuk jaring perangkap kemelaratan dalam kondisi negatif (Chambers, 1987).

Kemiskinan seringkali menimpa masyarakat pedesaan khususnya masyarakat nelayan. Pengertian nelayan menurut UU No 31 tahun 2004[22] tentang Perikanan menyebutkan bahwa: "Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan". Sedangkan TNP2K (2011)[23] mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Orang yang melakukan pekerjaan seperti membuat jaring atau menaikkan peralatan tangkap ke perahu/kapal tidak termasuk nelayan,

ahli mesin dan juru masak di kapal dimasukkan nelayan.

Nelayan tradisional merupakan salah satu kelompok penangkap ikan yang menggunakan peralatan tradisional dengan modal usaha kecil dengan organisasi penangkapan yang sederhana. Menurut Suyanto (2003 dalam Kusnadi, 2003) bahwa penyebab kondisi kesejahteraan nelayan tak kunjung membaik yaitu: 1) terkait hasil produksi yang rentan waktu atau cepat membusuk, sehingga karena keterbatasan modal membuat nelayan segera menjual guna mendapatkan uang; 2) perangkap utang, terutama pada saat musim tidak menentu dengan kemampuan membayar tidak seperti pada sektor lain tetapi sesuai irama musim. Kondisi demikian membuat komunitas nelayan khususnya nelayan tradisional berinisiatif mendirikan sebuah kelembagaan ekonomi. Peran kelembagaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi nelayan diantaranya nelayan tangkap (Astuty *et al.*, 2006)[24].

Kelembagaan ekonomi dari komunitas nelayan tradisional dalam penelitian ini masih berbentuk lembaga non formal berupa Forum Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Madu Jaya yang beranggotakan beberapa kelompok nelayan (KUB). Lembaga didirikan agar terwujud kemandirian dan peningkatan kesejahteraan nelayan yang terkendala sulitnya permodalan dan sulitnya akses lembaga keuangan formal. Selain itu diharapkan menjadi alternatif strategi bertahan hidup terutama saat paceklik dan cuaca buruk. Hal ini akan dianalisis dengan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dengan empat fungsional imperatif yaitu AGIL.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: 1) Bagaimana model kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional Karanggongso Trenggalek? 2) Bagaimana model kelembagaan ekonomi yang perlu dikembangkan pada komunitas nelayan tradisional sebagai salah satu strategi bertahan hidup bagi nelayan Karanggongso Trenggalek? Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan model kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional Karanggongso Trenggalek; 2) merumuskan pengembangan model yang tepat pada kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional sebagai salah satu strategi bertahan hidup bagi nelayan Karanggongso Trenggalek.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dipilih karena peneliti membutuhkan suatu informasi yang mendalam tentang detil kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional di Karanggongso yaitu Forum KUB Karang Madu Jaya. Peneliti juga menganalisis data-data yang telah diperoleh baik berupa kata-kata, gambar maupun dokumen untuk mengetahui model kelembagaan ekonomi beserta pengembangan model kelembagaannya.

Sumber data yang digunakan peneliti berupa data primer berupa kata-kata dan tindakan hasil wawancara dengan ketua RT dan pengurus Forum KUB Karang Madu Jaya di Karanggongso yang dicatat dan direkam melalui rekaman video; dan data sekunder yang bersumber di luar kata-kata dan tindakan, dalam hal ini berupa dokumen kelompok (KUB), dokumen lembaga (Forum KUB), dokumen ketua RT, dan data dari BPS Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini memilih lokasi di Dusun Karanggongso Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Hal ini didasarkan pada banyaknya rumah tangga usaha perikanan di wilayah tersebut dengan mayoritas mata pencaharian sebagai nelayan. Peneliti mulai melakukan observasi awal sebagai tahap perencanaan penelitian sejak diajukannya judul penelitian pada bulan Agustus 2015 sampai bulan Januari 2016.

Untuk menguji keabsahan data dari lapang, peneliti mengacu kepada teknik keabsahan data dengan pendekatan kualitatif meliputi: *credibility* (validitas internal), t*ransferability* (validitas eksternal), d*ependability* (reliabilitas), dan c*onfirmability* (obyektivitas).

Analisis terhadap yang telah diperoleh di lapang menggunakan model Miles, Huberman dan Saldana (2014)[25] yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis selanjutnya terhadap kelembagaan menggunakan teori Fungsionalisme Struktural dari Talcott Parsons yaitu fungsi AGIL.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD), observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan dan internet. Wawancara mendalam digunakan peneliti karena lebih bersifat terbuka dan luwes sesuai kebutuhan peneliti, dengan menggali informasi mengenai Forum KUB Karang Madu

Jaya dari pengurus lembaga, Tenaga Pendamping kelompok nelayan, dan Pejabat di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Trenggalek; serta ketua RT se-Karanggongso.

FGD dilakukan untuk membahas masalah pengembangan model Forum KUB Karang Madu Jaya serta dengar pendapat dari informan yaitu 10 pengurus dan pejabat dari DKP Kabupaten Trenggalek, sehingga dapat dijadikan acuan peneliti dalam mengembangkan model. Observasi dimaksudkan agar data yang didapat peneliti sesuai dengan apa yang disaksikan di lapang, yaitu observasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kondisi kelembagaan ekonomi komunitas nelayan di Karanggongso. Dokumentasi dipakai sebagai data pendukung untuk melengkapi data yang ada, yaitu dokumen dari: BPS kabupaten Trenggalek, semua ketua RT, serta pengurus lembaga. Studi kepustakaan dan internet digunakan peneliti untuk menambah informasi sesuai tema penelitian sehingga informasi yang disajikan peneliti lebih lengkap.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling* dengan menggali informasi awal sebagai pusat informasi, selanjutnya mereka diminta menunjukkan informan berikutnya sampai diperoleh informasi yang lengkap. Informan awal diperoleh peneliti dari Penyuluh Perikanan, selanjutnya diperoleh informasi dari ketua lembaga ekonomi komunitas nelayan tradisional. Penunjukan selanjutnya atas informasi dari informan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karanggongso merupakan salah satu dusun dari Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Karanggongso berada di pesisir pantai selatan Trenggalek dengan potensi wisata bahari Pantai Pusir Putih yang menjadikannya ramai dikunjungi wisatawan, sehingga banyak investor yang menanamkan sahamnya berupa penginapan maupun hotel.

Berdasarkan keterangan Kepala Dusun (Uceng), Karanggongso mempunyai 1 RW dan mempunyai 6 RT. Jumlah penduduk 1.275 orang terdiri dari 652 penduduk laki-laki dan 623 penduduk perempuan dengan 458 KK dengan mata pencaharian sebesar 75% sebagai nelayan sehingga ketergantungan terhadap kegiatan penangkapan ikan sangat tinggi. Banyaknya nelayan mendorong mereka mendirikan lembaga ekonomi Forum KUB Karang Madu Jaya untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses permodalan dan untuk strategi bertahan hidup saat paceklik dan musim yang tidak menentu.

Kondisi Sosial-Ekonomi Anggota Lembaga

Forum KUB Karang Madu Jaya berdiri pada tanggal 20 Agustus 2014 dan beranggotakan 6 KUB dengan total anggota mencapai 74 orang nelayan. Lembaga ini didominasi oleh nelayan yang masih muda kisaran umur 30-40 tahun dan 40-50 tahun, mereka termasuk tenaga produktif sehingga memacu dalam mencari nafkah di laut. Anggota lembaga merupakan rumah tangga kecil dengan jumlah anggota 3-4 orang. Dari sisi pendidikan anggota lembaga, mayoritas hanya mengenyam Sekolah Dasar (SD) sebesar 73%. Dapat dikatakan bahwa kualitas SDM masih rendah, tetapi mereka masih mengutamakan pendidikan anak dengan menyekolahkan sampai tingkat lebih tinggi.

Anggota Forum KUB Karang Madu Jaya menggunakan pancing dan jaring dalam aktivitas penangkapan ikan. Jenis pancing berupa pancing ulur, pancing gurita, pancing cumi, dan rawai dasar. Jaring yang digunakan biasanya berupa jaring insang (*gill net*) jenis jaring insang hanyut.

Dari aktivitas melaut anggota Forum KUB Karang Madu Jaya mempunyai pendapatan yang beragam, tergantung musim dan cuaca. Namun dari hasil wawancara dengan informan dapat dikalkulasi bahwa rata-rata pendapatan nelayan anggota Forum KUB sebesar 4 jutaan per bulan. Pengeluaran juga beragam, tergantung tingkat pendidikan dan jumlah anak usia sekolah. Semakin tinggi jenjang pendidikan dan semakin banyak anak berusia sekolah, semakin tinggi pula pengeluaran nelayan anggota Forum KUB.

Kondisi/Model Kelembagaan Ekonomi ditinjau dari Perspektif AGIL

1. Fungsi *Adaptation* (Adaptasi) pada Lembaga

Terbentuknya Forum KUB merupakan harapan baru bagi nelayan Karanggongso. Untuk menjaga eksisitensinya, dibutuhkan kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Termasuk adaptasi menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Peran lembaga ekonomi sangat dibutuhkan dalam menyongsongnya, sebagai peluang bagi nelayan Karanggongso untuk bersaing dalam pasar bebas dalam hal ekspor ikan. Karena Karanggongso mempunyai potensi perikanan yang bisa dikembangkan, terutama produksi ikan layur, ubur-ubur dan ikan tuna yang masih menjadi primadona nelayan setempat.

Namun potensi tersebut masih terkendala prasarana. Terbatasnya modal dan jasa penunjang, menjadikan rendahnya posisi tawar. Selain itu juga rendahnya teknologi penangkapan

yang berpengaruh terhadap produksi hasil perikanan. Hal ini diantisipasi dengan menjalin komunikasi dan bertukar informasi dengan nelayan luar daerah untuk mengetahui perkembangan terkini.

Kemampuan adaptasi Forum KUB Karang Madu Jaya sesuai dengan Fungsi Adaptasi Parsons:

> *"Adaptasi: suatu sistem harus mengatasi kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. Sistem itu harus beradaptasi dengan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya." (*Ritzer, 2012:411*)*

Fungsi adaptasi merupakan fungsi untuk mempertahankan sumber-sumber penting dalam sistem sosial dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan sebaliknya. Kemampuan adaptasi dapat dianalisis dengan mengidentifikasi kemampuan Forum KUB dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya di Karanggongso, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan perikanan tangkap.

Adaptasi lainnya adalah kompetisi dengan nelayan *andhon* yang berpengaruh terhadap perubahan sosial ekonomi. Selain itu juga adaptasi terhadap revolusi biru dimana ada perubahan pola pikir dari darat ke laut.

Dalam rangka beradaptasi maka Forum KUB mengumpulkan modal dari anggota untuk kelangsungan usaha berupa usaha simpan pinjam dan usaha toko kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian akan memberi kemudahan dalam hal permodalan untuk bertahan hidup dan terlepas dari ikatan hutang. Modal merupakan salah satu sarana dari fungsi adaptasi Parsons. Modal yang dikumpulkan berupa iuran pokok, iuran wajib dan tabungan sukarela. Keuntungan dari sisa hasil usaha dibagi dengan persentase sesuai beban kerja anggota.

2. Fungsi *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Tujuan didirikannya Forum KUB Karang Madu Jaya sebagaimana tertuang dalam AD/ART adalah peningkatan keterampilan masyarakat agar mampu membangun kelautan dan perikanan serta pengelolaan sumber daya alam semakin meningkat dan berkelanjutan sesuai kaidah konservasi. Secara spesifik tujuan tersebut lebih menitikberatkan pada kesejahteraan anggota masyarakat pesisir terutama nelayan. Dengan adanya Forum KUB akan memudahkan antar KUB anggota dalam koordinasi, pengarahan dan pembinaan. Untuk itu diperlukan dukungan penuh baik tenaga maupun pikiran, dari pengurus, anggota maupun *stakeholder* terkait untuk pengembangan kelembagaan tersebut.

Hal ini sesuai dengan fungsi *Goal Attainment* Parsons bahwa fungsi bisa tercapai bila sistem memprioritaskan tujuan dan memobilisasi sumber daya yang ada dalam sistem (Haryanto, 2012). Salah satu cara pencapaian tujuan dalam Forum KUB adalah kegiatan-kegiatan, sarana atau peralatan, dan dorongan sumber daya pengurusnya. Jika peran dan fungsi, sarana atau peralatan, serta kegiatan mereka kurang maksimal maka tujuan lembaga tidak akan tercapai.

Kegiatan-kegiatan Forum KUB selalu dalam arahan Tenaga Pendamping dari DKP Kab. Trenggalek. Namun kendalanya adalah keterbatasan Tenaga Pendamping dan kurang aktifnya Tenaga Penyuluh Perikanan khusunya untuk wilayah Watulimo. Tenaga Pendamping merangkap di tiga kecamatan sehingga waktu dan tenaga untuk Forum KUB juga kurang maksimal, sedangkanTenaga Pneyuluh Perikanan kurang aktif melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap lembaga ekonomi tersebut.

Hal ini dikuatkan pendapat Parsons bahwa suatu sistem kepribadian yang pasif jelas menjadi suatu mata rantai yang lemah di dalam suatu teori terintegrasi (Ritzer, 2012).

Proses terbentuknya Forum KUB juga tidak terlepas dari dasar-dasar yang melandasinya sebagaimana dijelaskan Hendropuspito (1989)[26] Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2012) diantara ciri umum yang menandai kelembagaan adalah mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga. Forum KUB belum dapat memenuhi ciri tersebut, yaitu belum adanya bangunan permanen sebagai tempat berkumpulnya anggota dan penyimpanan aset. Selain itu juga belum dimiliki lambang sebagai ciri khas kelembagaan.

3. Fungsi *Integration* (Integrasi) pada Lembaga

Forum KUB mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari pengurus inti dan seksi-seksi berjumlah 15 pengurus yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lembaga. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota melalui rapat anggota yang mewakili masing-masin KUB anggota. Pergantian pengurus dilakukan setiap 5 tahun sekali atau sewaktu-waktu dibutuhkan melalui rapat anggota.

Struktur dalam sebuah organisasi termasuk sistem sosial yang menangani fungsi integrasi dengan mengendalikan komponennya. Sistem sosial dilihat sebagai suatu sistem interaksi dengan dasar kompleks peran-status. Status

mengacu kepada posisi struktural di dalam sistem sosial, sedangkan peran adalah apa yang dilakukan oleh aktor dalam posisi tersebut (Ritzer, 2012)

Komponen-komponen berfungsi untuk keberlangsungan sistem. Forum KUB mempunyai seksi-seksi yang mempunyai peran dan fungsi sesuai aturan lembaga. Namun beberapa dari seksi belum bisa melaksanakan secara maksimal diantaranya seksi perencana, seksi produksi, dan seksi pemasaran Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal lembaga sehingga semua tidak bisa berfungsi maksimal.

Fungsi integrasi dalam Forum KUB berupa solidaritas sesama anggota dalam pertemuan rutin lembaga, kerelaan bekerja sama, membahas masalah dan saling bergantung satu sama lain sesuai posisi dan peran masing-masing.

4. Fungsi *Latency* (Pemeliharaan Pola)

Penetapan aturan Forum KUB Karang Madu Jaya dijelaskan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pada tahap awal terbentuknya Forum KUB, belum diberlakukan sanksi tegas, namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran dari pengurus dan anggota, maka sanksi-sanksi mulai diberlakukan. Hal ini telah disepakati semua pihak.

Terlihat jelas bahwa disini fungsi *Latency* (Pemeliharaan Pola) telah berjalan meskipun belum sepenuhnya. Fungsi *Latency* merupakan suatu proses ketika sistem memelihara motivasi dan kesepakatan sosial dengan menggunakan *social control*. Komitmen para anggota harus tetap utuh sehingga peran sistem pada waktu yang tepat dapat diaktifkan kembali, sehingga akan tercipta pemahaman dan kesepakatan sosial dari pengurus dan anggota Forum KUB Karang Madu Jaya untuk mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dengan menggunakan *social control* demi menjaga keutuhan komitmen.

Penerapan aturan berlaku pula dalam permodalan. Modal yang cukup akan membuat lembaga bentukan nelayan tersebut eksis dan mampu mencukupi kebutuhan baik anggota maupun luar anggota, seperti pemenuhan kebutuhan untuk pembelian dan perbaikan alat tangkap, dan permodalan untuk usaha anggota.

Kelembagaan merupakan kumpulan norma dan nilai yang mengatur hubungan antar masyarakat. Proses pembentukan Forum KUB Karang Madu Jaya tidak terlepas dari proses pelembagaan (*institutionalization*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Soekanto (2012) tentang proses terjadinya lembaga kemasyarakatan yaitu melalui cara, kebiasaan, tata kelakuan dan menjadi adat istiadat. Karena telah melewati proses *institutionalization*, akhirnya norma-norma menjadi melembaga dan mendarah daging dalam jiwa masyarakat (*internalized*). Kumpulan beberapa norma di atas kemudian tergabung dalam bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat nelayan tradisional (Forum KUB Karang Madu Jaya) dengan mengumpulkan tabungan dari anggota-anggotanya kemudian dijadikan sebagai modal usaha dan simpan pinjam dalam rangka strategi bertahan hidup (*survival strategy*).

Lembaga Ekonomi sebagai Salah Satu Strategi Bertahan Hidup

Lembaga ekonomi komunitas nelayan tradisional di Karanggongso yaitu Forum KUB Karang Madu Jaya merupakan lembaga yang dibangun atas dasar kesamaan kepentingan maupun tradisi/kebiasaan baik domisili, lokasi usaha, status ekonomi maupun bahasa. Forum KUB menjadi satu alternatif strategi bagi masyarakat nelayan tradisional dalam mekanismenya untuk bertahan hidup (*survival strategy*) yang pada umumnya terkendala sempitnya kepemilikan aset sumber daya lahan dan keterbatasan permodalan. Kekuatan bertahan hidup masyarakat nelayan tradisional di Karanggongso dilakukan dengan memanfaatkan sumber yang tersedia seperti lembaga ekonomi pada komunitas mereka jika kondisi ekonomi mengalami perubahan atau memburuk.

Sebagaimana diketahui masyarakat nelayan sangat tergantung kepada musim dan cuaca. Musim paceklik yang datang setiap tahun menyebabkan kehidupan perekonomian nelayan tradisional mengalami kegoncangan, selain itu juga faktor lain yang tidak kalah berperan dalam pemiskinan nelayan adalah kultur dalam manajemen keuangan. Beberapa dimensi kemiskinan yang melanda masyarakat nelayan tradisional di Karanggongso sebagaimana teori Chambers (1987) adalah:

1) Kemiskinan itu sendiri

Kemiskinan yang dialami nelayan tradisional di Karanggongso tidak berlangsung secara kontinyu tetapi secara insidentil, disaat musim paceklik maupun cuaca buruk yang berlangsung lama. Hal ini terjadi karena pola hidup masyarakat nelayan yang cenderung boros ketika musim ikan, sehingga ketika musim paceklik tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk upaya bertahan hidup (*survival strategy*) selain menjual segala yang dimiliki maupun berhutang.

2) Kelemahan fisik

Dari dimensi kelemahan fisik bukan menjadi kendala nelayan tradisional Karanggongso, karena pada umumnya mereka berusia produktif dan secara fisik nelayan Karanggongso kuat. Nelayan usia lanjut sudah mulai beralih profesi menggarap lahan perhutani maupun lainnya yang tidak begitu membutuhkan fisik yang prima.

3) Isolasi/Keterasingan

Dimensi keterasingan tidak ditemukan pada nelayan tradisional di Karanggongso. Pemerintah sudah membenahi infrastrukturnya sehingga memudahkan masyarakat menjalankan roda perekonomiannya. Karanggongso juga merupakan salah satu wilayah Jalur Lintas Selatan (JLS) yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat (Kementerian) dan dibangun untuk menghubungan wilayah-wilayah di sepanjang jalur pantai selatan.

4) Kerentanan

Masyarakat nelayan tradisional menghidupi keluarga dari aktivitas penangkapan ikan di laut. Kondisi kemiskinan yang insidentil juga menjadikan mereka rentan pada saat kondisi perikanan tangkap musim paceklik maupun cuaca yang kurang mendukung dan berlangsung lama, sehingga keluarga nelayan terpaksa menjual maupun menggadaikan kekayaan yang dimiliki untuk bertahan hidup.

5) Ketidakberdayaan

Masyarakat nelayan di Karanggongso yang telah menjalin hubungan dengan *bakul* (pedagang ikan) mayoritas tidak berdaya untuk beralih ke *bakul* lain untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapannya. Faktor hutang piutang yang telah terjalin sejak lama menjadi salah satu penyebabnya, tetapi tidak semua nelayan terikat dengan hutang piutang tersebut. Meskipun nelayan merasa terbantu secara finansial karena tidak ada keharusan untuk segera melunasinya, namun ikatan tersebut menyebabkan nelayan merasa berhutang budi kepada *bakul* dan sungkan apabila menjual hasil tangkapan kepada *bakul* lainnya. Sebagian nelayan sudah merasa cocok dan ada kedekatan dengan *bakul* sehingga meskipun tidak ada ikatan hutang piutang namun mereka tetap menjual hasil tangkapannya ke *bakul* tersebut.

Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Komunitas Nelayan Tradisional sebagai Salah Satu Strategi Bertahan Hidup

Keberadaan Forum KUB Karang Madu Jaya yang baru berdiri selama satu tahun membuat lembaga tersebut masih perlu banyak pembenahan di berbagai bidang. Berdasarkan analisis fungsional imperatif AGIL maka dapat identifikasi kondisi dari penelitian di lapang berupa: 1) Terbatasnya permodalan; 2) Belum ada solusi untuk masalah kebersihan dan keamanan lingkungan, 3) Terbatasnya Tenaga Pendamping dan kurang maksimalnya fungsi dan peran Tenaga Penyuluh Perikanan dalam membimbing kelompok nelayan; 4) Belum terpenuhinya salah satu ciri kelembagaan yaitu ketiadaan sekretariat lembaga/Forum KUB Karang Madu Jaya.

Mekanisme Pengembangan Model

Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada Forum KUB tersebut bisa dicarikan alternatif solusinya. Usulan yang logis sekiranya dapat membantu membenahi kelembagaan tersebut sehingga menjadikan Forum KUB lebih mandiri dan berdaya saing serta bisa mewujudkan tujuan lembaga yaitu peningkatan kesejahteraan hidup anggotanya. Berdasarkan analisis imperatif fungsional AGIL dapat dikembangkan pengembangan model sebagai berikut:

1. Mengembangkan jaringan dengan lembaga keuangan yang telah eksis dan akomodatif
2. Memberikan alternatif solusi untuk masalah kebersihan dan keamanan lingkungan
3. Penambahan Tenaga Pendamping dan peningkatan peran dan fungsi Tenaga Penyuluh Perikanan

Mewujudkan salah satu ciri kelembagaan yaitu pembentukan sekretariat.

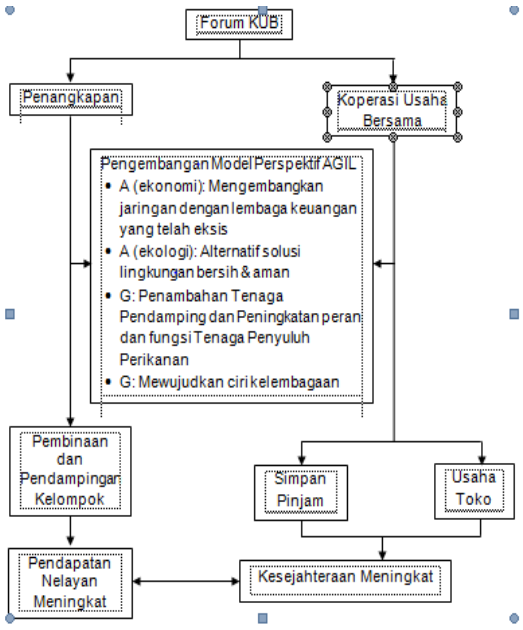

Gambar 2. Pengembangan Model Kelembagaan Ekonomi Komunitas Nelayan Tradisional

KESIMPULAN

Model kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional di Karanggongso berupa Forum KUB Karang Madu Jaya yang beranggotakan enam kelompok bukan perorangan. Bidang usaha meliputi penangkapan ikan dan koperasi usaha bersama berupa simpan pinjam dan usaha gerai/toko. Forum KUB menjadi satu alternatif strategi bagi masyarakat nelayan tradisional dalam mekanismenya untuk bertahan hidup (*survival strategy*) yang pada umumnya terkendala sempitnya kepemilikan aset sumber daya lahan dan keterbatasan permodalan. Kekuatan bertahan hidup masyarakat nelayan tradisional di Karanggongso dilakukan dengan memanfaatkan sumber yang tersedia seperti lembaga ekonomi pada komunitas mereka jika kondisi ekonomi mengalami perubahan atau memburuk.

Berdasarkan analisis imperatif fungsional terhadap kelembagaan dengan skema AGIL dari Parsons, dapat diketahui beberapa kelemahan yang ada pada Forum KUB Karang Madu Jaya. Kelemahan tersebut diantaranya pada fungsi Adaptasi (ekonomi) berupa terbatasnya permodalan dan fungsi Adaptasi (ekologi) berupa berupa kebersihan dan keamanan lingkungan yang masih jauh dari harapan; serta lemahnya fungsi Pencapaian Tujuan berupa terbatasnya Tenaga Pendamping dan kurang maksimalnya fungsi dan peran Tenaga Penyuluh Perikanan, dan belum terpenuhinya ciri kelembagaan yaitu ketiadaan sekretariat. Semua kelemahan tersebut berakibat pada belum maksimalnya fungsi-fungsi kelembagaan seperti penyedia sarana prasarana produksi perikanan, pengolahan dan pemasaran, jasa penunjang dan kegiatan bersama. Namun kelebihan berada pada keaktifan dan kekompakan para pengurus Forum KUB Karang Madu Jaya.

Pengembangan model juga dilakukan dengan analisis imperatif fungsional dalam skema AGIL dengan memaksimalkan dua fungsi yaitu: a) fungsi Adaptasi berupa pengembangan jaringan dengan lembaga yang telah eksis dan akomodatif dan pemberian alternatif solusi bagi masalah kebersihan dan keamanan lingkungan, b) fungsi Pencapaian Tujuan berupa penambahan Tenaga Pendamping dan peningkatan peran-fungsi Tenaga Penyuluh Perikanan, dan mewujudkan salah satu ciri kelembagaan yaitu dengan pembentukan sekretariat.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah: 1) perlu kajian lebih lanjut mengenai uji coba pengembangan model kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional dengan melakukan analisis data menggunakan Analisis SWOT; 2) Perlu penelitian uji coba terhadap pengembangan model kelembagaan ekonomi komunitas nelayan tradisional kemudian dilakukan evaluasi terhadap proses tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Gubernur Jawa Timur dan BKD Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan melalui Beasiswa Tugas Belajar di Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Prof. Dr. Mohammad Bisri, MS. selaku Rektor Universitas Brawijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono Wisadirana, MS selaku Dekan FISIP sekaligus Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Prof. Dr. Ir. Sanggar Kanto, MS selaku Ketua Program Pasca Sarjana sekaligus Anggota Komisi Pembimbing, atas segala informasi, arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tesis ini;
4. Ibu Anif Fatma Chawa, S.Sos., M.SI., Ph.D selaku Dosen Penguji I dan Bapak Dr. Ir. Edi Susilo, MS selaku Dosen Penguji II, atas segala informasi, arahan dan bimbingan dalam penyusunan Tesis ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar atas pendidikan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya;
6. Semua pihak yang telah membantu penyusunan dan penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan di *Yaumul Hisab* nanti. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Apridar, 2010. *Ekonomi Kelautan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

[2]. Kusnadi, 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Jakarta: LK3S

[3]. Kusnadi, 2006. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKIS

[4]. Soyomukti, Nurani. 2014. *Pola Hidup Boros Masyarakat Pesisir Pantai Prigi*. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2015 melalui

http://www.pama.or.id/2014/10/pola-hidup-boros-masyarakat-pesisir.html

[5]. Nikijuluw, Victor P.H. 2001. *Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Strategi Pemberdayaan Mereka dalam Konteks Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Secara Terpadu* Makalah. IPB: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan; dan University of Rhode Island: Proyek Pesisir-Coastal Resources Management Project Coastal Resources Center. Makalah, hlm. 14-27

[6]. Mulyadi, 2007. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

[7]. Hadi, Syamsul. 2012. *Peran Kelembagaan Lokal terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Jember.* Penelitian Dosen

[8]. Ariyanto, Edi dan Yulia Anas. 2007. *Rekonstruksi Pemodelan Kelompok Usaha Bersama dalam Program Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial*. Artikel Hibah Penelitian Bersaing

[9]. Tjahyono, Agus *et al*.. 2008. *Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Keuangan Mikro dan Lembaga Lokal (Adat) dalam Mendukung Pemanfaatan Potensi Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Trenggalek*. Laporan Penlitian Hibah Bersaing, Universitas Brawijaya Malang

[10]. Rostin, 2012. *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Malang: Universitas Brawijaya. Disertasi

[11]. Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: dari Klasik hingga Postmodern*. Yogyakarta: A-Ruzz Media

[12]. Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Penj. Pasaribu *et.al* dalam judul asli *Sociological Theory*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

[13]. Nurnida, Ida. 2014. *Peran Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat*. Jurnal MIMBAR, Vol. 30, No. 2 (Desember, 2014), hlm 159-170

[14]. North, Douglass C. 1991. *Institutions*. Journal of Economic Perspectives – Volume 5, Number I – Winter 1991 – Pages 97-112

[15]. Syahyuti, 2010. *Paham Kelembagaan Baru (Scott, 2008*). Diakses pada tanggal 11 Oktober 2015 melalui http://syahyutilembagaorganisasi.blogspot.co.id/2010/12/paham-kelembagaan-baru-scott-2008.html

[16]. Syahyuti *et al*.. 2013. *Kajian Peran Organisasi Petani dalam Mendukung Pengembangan Pertanian*. Jakarta: Balitbangtan. Makalah Proposal Operasional Penelitian

[17]. Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

[18]. Alvita, Amanda Sierra. 2013. *Strategi Kelangsungan Hidup Pemulung di Pinggiran Rel Stasiun Gubeng Surabaya*. Madura: Universitas Trunojoyo. Skripsi

[19]. Anindyasari, Fitria. 2013. *Anak Jalanan (Studi Deskriptif Anak Jalanan Bekerja Sebagai Penjual Koran di kota Surabaya)*. Surabaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

[20]. Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami kemiskinan secara Multidimensional*. Jurnal JMPK Vol. 08/No. 03/September/2005, hlm 121-129

[21]. Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang*, Penj. Pepep Sudrajat. Jakarta: LP3ES

[22]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

[23]. TNP2K, 2011. *Pendataan Rumah Tangga Miskin di Wilayah Pesisir/Nelayan*. Disampaikan oleh: Deputi Seswapres Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan, selaku Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

[24]. Astuty, Ernany Dwi dkk. 2006. *Restrukturisasi Institusi Ekonomi*. Jakarta, Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

[25]. Miles, Mattew B, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (*Third Edition).* California: SAGE Publications, Inc.

[26]. Hendropuspito, 1989. *Sosiologi Sistematik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius